

BAB V

KESIMPULAN

1.1. Kesimpulan

Pada bagian akhir penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, serta saran berdasarkan hasil temuan penelitian. Secara umum *Collaborative Governance* dalam penanganan konflik agraria di Desa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo sudah berjalan dengan baik, efektif dan efisien, dengan adanya kolaborasi antar lembaga dan aparat terkait dapat membantu untuk menangani atau juga meredam konflik agraria yang terjadi di desa wadas, lebih jelasnya peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kolaborasi yang dijalankan antar lembaga dan aparat bahkan ke masyarakat dengan metode *Face To Face Dialog* dalam menangani konflik agraria di desa wadas ini dilakukan dengan cara komunikasi yang intensif melalui diskusi, sosialisasi, musyawarah hingga edukasi dengan cara pendekatan-pendekatan tertentu, tak lupa juga dalam memberikan informasi berdasarkan fakta yang ada, tidak ada yang dilebih-lebihkan ataupun dikurang-kurangi. Walaupun didalam diskusi secara langsung dengan berbagai cara tingkat partisipasi masyarakat masih sangat jauh dari harapan, sehingga fokus diskusi dan proses-proses berlangsung hanya mengutamakan masyarakat yang sudah setuju dan sepakat namun juga tidak mengesampingkan masyarakat yang kontra, tetap dilakukan juga dengan pendekatan-pendekatan khusus yang memang waktunya tergolong sangat lama.
2. Dalam hal *Trust Building* atau juga disebut membangun kepercayaan antar lembaga dengan masyarakat sangat diperlukan sehingga antar lembaga baik pusat hingga daerah bersama kemitraan lembaga swasta bekerjasama bahu membahu membangun sebuah kepercayaan baik melalui kesepakatan atau pun perjanjian yang dilakukan dalam proses pembebasan lahan maupun proses pembagunan. Dalam membangun

kepercayaan ini tentunya memerlukan komunikasi yang sangat intensif dari berbagai lembaga di tingkat desa bahkan sampai tingkat daerah maupun provinsi, fasilitasi tempat juga merupakan sebuah cara membangun kepercayaan yang dilakukan antara lembaga dengan masyarakat, melakukan pendampingan-pendampingan dari awal hingga akhir kepada masyarakat merupakan bentuk membangun kepercayaan yang dilakukan, aparat keamanan melakukan patroli keamanan dan ketertiban lalu tidak berpihak sebagai upaya membangun kepercayaan. Dan didalam proses kolaborasi yang dilakukan tidak ada ketergantungan disuatu lembaga saja, namun antar lembaga bekerja sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya untuk penanganan konflik agraria yang dilakukan dalam membangun kepercayaan. Masyarakat hingga BUMD juga dilibatkan didalam proses pekerjaan pembangunan sebagai pekerja, keamanan, hingga penyedia keperluan pekerja sebagai bentuk membangun kepercayaan.

3. Selanjutnya para tahapan *Commitmen On Process* para lembaga sudah sangat baik didalam menjaga komitmen satu sama lainnya didalam proses kolaborasi dimana antar lembaga mempunyai tanggung jawab yang tinggi bersama-sama menjalankan tugas sesuai aturan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat karena pada dasarnya Proyek Strategis Nasional ini merupakan program pemerintah pusat dan pemerintah desa atau daerah hanya pelaksana saja. Dalam melakukan pengamanan pihak TNI dan Kepolisian tetap memegang teguh SOP & Tupoksi yang ada dikesatuannya masing-masing didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, selain itu juga Pihak aparat mempunyai tugas yang sangat penting didalam pelaksanaan ini yaitu memastikan kondisi masyarakat aman, tertib dan kondusif sehingga tidak terjadi gesekan-gesekan yang memicu konflik terjadi. Pemerintah Desa selalu berkoordinasi terkait perjanjian kesepakatan bantuan-bantuan yang diberikan oleh CSR, dan pemerintah kecamatan juga tetap memonitoring penanganan yang dilakukan agar sesuai dengan Analisis Dampak Lingkungan atau

AMDAL sehingga AMDAL benar-benar dijalankan. BPN dalam menjaga tugas serta tanggung jawab bersama-sama lembaga lainnya mempunyai strategi 4K yaitu Komunikasi, Kordinasi, Komitmen, dan Kolaborasi. Penentuan lokasi menjadi komitmen yang penting karena memang sudah sesuai dengan rencana tata ruang kabupaten Purworejo, dan juga kebutuhan air bersih, irigasi, PDAM yang ada khususnya di kabupaten Purworejo dan wilayah sekitarnya.

4. Dalam pelaksanaan kolaborasi yang dijalankan perlu adanya *Share Understanding* atau menyampaikan pemahaman bersama mengenai konflik ini terjadi beserta penanganannya yang dilakukan, strategi hingga keterbukaan informasi yang dilakukan oleh para lembaga. Dalam hal ini antar lembaga bahkan masyarakat sepakat bahwa konflik agraria ini terjadi karena pengaruh dari oknum Pihak ke 3 yang mengatasnamakan LSM, LBH, dan juga Mahasiswa yang masuk mempengaruhi masyarakat dengan informasi-informasi negatif dan menyimpang hingga akhirnya masyarakat menjadi ketakutan, khawatir dan melakukan penolakan bahkan terjadi konflik. Untuk itu strategi sangat diperlukan dengan memberikan informasi sesuai fakta dan merealisasikan dengan bukti-bukti yang nyata terhadap pembebasan lahan dan bantuan-bantuan lainnya hingga kesepakatan yang diminta masyarakat. Tidak hanya di Desa Wadas yang mengalami pembebasan lahan, ada 7 desa di Kecamatan Bener yang terkena pembebasan namun hanya desa wadas yang mengalami konflik karena adanya kepentingan. Sosialisasi yang kurang matang hanya sampai dipermukaan menjadi faktor lainnya yang menyebabkan kesalahpahaman dimasyarakat sehingga muncul informasi negatif. Selama proses pembebasan lahan tidak ada masyarakat yang dihukum pidana, namun hanya sebatas pengamanan saja yang dilakukan untuk meredam konflik. Lalu setiap lembaga tentunya dalam memberikan informasi sangat terbuka dan transparan tidak ada yang ditutup-tutupi, serta pelaporan dilaporkan kepada pimpinannya masing-masing untuk ditindaklanjuti.

5. Kemudian *Intermediate Outcome* atau hasil keluaran sementara terhadap proses yang dilakukan dengan begitu maka akan timbul sebuah hasil yang nyata yaitu sebuah kesuksesan karena masyarakat semakin menjadi setuju dan yakin terhadap proses pembebasan lahan dan pembangunan. Suasana masyarakat saat ini menjadi aman dan kondusif walaupun masih perlu dilakukan pendekatan khusus agar suasana kembali mencair seperti sebelum terjadinya konflik. Patroli hingga monitoring juga terus dilakukan untuk memastikan agar kegiatan-kegiatan yang memicu hal-hal negatif tidak terjadi lagi. Dari total 432 orang yang terkena pembebasan lahan, 137 setuju dan 259 orang menolak didata awal hingga saat ini masih tersisa 1 orang saja namun sudah dilakukan konsiyansi atau penitipan ganti rugi ke pengadilan negeri, hal-hal tersebut dilakukan karena lembaga dan pemerintah sudah mengupayakan berbagai cara hingga akhirnya konsiyansi dilakukan oleh lembaga.

Dari kelima indikator proses *Collaborative Governance* tersebut yang paling penting dan sangat menentukan kesuksesan dari proses *Collaborative Governance* adalah *Face To Face Dialog* karena dengan bertatap muka serta berkomunikasi langsung bisa membangun seluruh aspek-aspek didalam kolaborasi hingga terciptanya kesuksesan dalam pembebasan lahan dan pembangunan lancar.

6. Selama proses *Collaborative Governance* yang dijalankan antar lembaga tidak terjadinya hambatan karena masing-masing lembaga masih 1 tujuan bersama demi suksesnya proyek strategis nasional, namun dimasyarakat terjadi hambatan yaitu pengaruh oknum LBH, LSM, & Mahasiswa kemasyarakatan sehingga menghambat proses pembebasan lahan dan pembangunan. Dan tim pelaksana pekerjaan tidak mengalami hambatan-hambatan mungkin hanya faktor cuaca hujan yang mengharuskan berhenti sejenak serta medan diperbukitan yang sedikit menyulitkan pekerjaan.
7. Selanjutnya para lembaga dalam menjalankan kolaborasi yang dijalankan selalu melakukan upaya-upaya yang dilakukan, upaya-upaya ini dilakukan juga sebagai bentuk strategi lembaga pemerintah kepada

masyarakat untuk menimalisir hal-hal yang tidak diinginkan sehingga proses pembebasan lahan dapat berjalan dan pembangunan bisa lancar. Dalam proses pembangunan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan salah satunya yaitu langsung menangani aduan masyarakat terkait proyek pembangunan, penanganan dilakukan dengan koordinasi terlebih dahulu kepada Tim Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak untuk selanjutnya dilakukannya penindakan. Dalam menghilangkan kekhawatiran dimasyarakat dilakukan dengan komunikasi hingga pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat, pembangunan sarana jalan, irigasi hingga akses internet juga merupakan bentuk upaya strategi yang dilakukan. Selain itu juga ada sarana hiburan untuk masyarakat yang dibuat yaitu kesenian tarian ndolalak, kesenian wayang kulit, pengajiana, sholwatan hingga kegiatan lomba-lomba yang diadakan didesa wadas. Tak lupa juga antisipasi bencana atau juga disebut sebagai mitigasi bencana dilakukan dengan berbagai cara agar bencana berbagai bentuknya tidak terjadi menimpa penduduk masyarakat Desa Wadas.

Didalam pelaksanaan *Collaborative Governance* sendiri yang dilakukan sebagai upaya penanganan konflik agraria didesa Wadas Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah sudah sangat baik dengan dilihat diberbagai indikator-indikatornya yang terbilang sangat bagus sekali didalam menjalankan tugasnya hingga saat ini konflik sudah bisa diatasi, pembebasan lahan lancar, pembangunan tidak ada hambatan hingga menjadi sukses bagi setiap lembaga hingga pemerintah desa, pemerintah daerah bahkan aparat yang terlibat didalam kolaborasi yang berlangsung tersebut. Tentunya pasti ini akan menjadi sejarah dan cerita tersendiri bagi penanganan konflik agraria yang ada diindonesia, yang mungkin bisa menjadi percontohan disetiap daerah diindonesia dalam segi penanganan dengan berkolaborasi.

1.2. Rekomendasi

Peneliti menyampaikan rekomendasi yang dirumuskan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang dianggap memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini. Rekomendasi terbagi menjadi dua bagian yaitu rekomendasi akademik dan rekomendasi praktis. Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan peneliti kepada para peneliti selanjutnya dan juga rekomendasi kepada lembaga, dinas ataupun aparat, sebagai berikut :

1.2.1. Rekomendasi Akademik

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya, yakni sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menambah kajian keilmuan khususnya Ilmu Pemerintahan terkait Collaborative Governance karena teori tersebut sangat berkaitan dengan penanganan konflik yang dilakukan pemerintah.
2. Penelitian mengenai konflik agraria di desa wadas sudah sangat banyak sekali, namun masih sangat minim dalam membahas kesuksesan penanganan yang dilakukan melalui Collaborative Governance, sehingga peneliti selanjutnya harus memberikan kesan positif terhadap kinerja pemerintah dan tidak hanya menyorot hal negatifnya saja.

1.2.2. Rekomendasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti bermaksud untuk memberikan saran dan rekomendasi bagi lembaga dan aparat dengan harapan bisa bermanfaat bagi lembaga dan aparat yang berkaitan, yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa Wadas harus lebih tertib administrasi lagi jangan sampai di kantor desa tidak memiliki dokumen pendukung yang berkaitan dengan masyarakat ataupun proses pembebasan lahan dari awal sampai akhir. Dan juga harus selalu update data yang terbaru mengenai data kependudukan dllnya.
2. Pemerintahan Kecamatan Bener terutama petugas pelayanan harus fokus terhadap isi surat yang diberikan, jangan sampai salah disposisi

surat yang harusnya surat untuk wawancara bu Camat, justru didisposisi ke Dinas Perizinan satu pintu yang mana peneliti sudah menempuh perizinan itu semua.

3. Aparat kepolisian sektor Bener sebaiknya agar memberi informasi jangan mendadak, harus direncanakan terlebih dahulu agar peneliti bisa mengatur waktu dengan tepat.
4. Aparat TNI yaitu Danramil dan juga Babinsa dalam membalas surat sangat lama sekali, hingga akhirnya peneliti selalu mendatangi kantor. Sebaiknya agar surat yang masuk bisa direspon sangat cepat
5. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Purworejo bagian data kurang terbuka sehingga menimbulkan kurangnya sinkron antara pimpinan dan staff, padahal dari pimpinan atau kepala BPN Purworejo sudah memberi izin untuk memberikan data.
6. Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak terutama Bagian Umum harus lebih bijaksana lagi sebagai aparatur Negara didalam menerima tamu mahasiswa untuk penelitian, alangkah baiknya dipelajari dulu proposal maupun bahan wawancaranya tidak langsung ditolak begitu saja.
7. Sekertariat DPRD Kabupaten Purworejo agar memberikan informasi dan data terkait narasumber untuk wawancara kepada peneliti karena waktu cukup lama menunggu informasi dari DPRD, hingga akhirnya peneliti harus bergerak sendiri melalui partai untuk bisa bertemu dengan pihak DPRD Purworejo.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo dalam unsur pelayanan harus diperbaiki bagaimana menemui masyarakat yang ingin melakukan penelitian. Harus bisa menjaga atau kontrol emosi, melayani serta menjelaskan informasi dengan etika yang baik dan membaca isi surat yang diharapkan oleh peneliti sehingga tidak salah persepsi. Informasi yang disampaikan antar pegawai selalu berbeda-beda.